GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 25/1/2005**

Subyek : **Hari : Selasa**

Kata Kunci : **Halaman : 7**

Charuk Katana Diancam akan Dibunuh

JAKARTA (Media): *Chairman* PT Monagro Kimia, Charuk Katana Muritkul, diancam akan dibunuh. Ancaman itu terkait laporan suap PT Monagro Kimia --anak perusahaan Monsanto Company-- kepada 140 pejabat Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber *Media* mengatakan hal tersebut sebelum Charuk Katana Muritkul diperiksa KPK, kemarin, di kantor KPK Jl Veteran II/2 Jakarta.

Charuk sendiri usai diperiksa KPK tidak mau memberi komentar apa pun kepada wartawan yang telah lama menunggu. Charuk didampingi dua pengacaranya, Ken Cheung dan Damain Adam, berjalan cepat sembari menutup wajahnya dengan satu tangan dan langsung masuk ke Mercy warna hitam.

Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas usai memeriksa Charuk, mengaku tidak tahu banyak adanya ancaman pembunuhan terhadap Chairman Monagro Kimia itu. "Benar atau tidak ancaman itu, saya kira perlu diwaspadai saja. Kami hanya memeriksa sebatas yang dilaporkan ke KPK," dalih Erry. Dalam pemeriksaan, ungkap Erry Riyana Hardjapamekas, Charuk tidak bisa memberikan nama-nama pejabat Indonesia yang diduga menerima suap karena kasus ini sedang diproses oleh aparat hukum Amerika Serikat (AS). Diakui Erry, Charuk juga tidak mengetahui banyak kasus suap yang terjadi tahun 1997-2002 tersebut. Hal itu karena dia baru menjabat Chaiman Monagro Kimia pada November 2004. "Dia tidak tahu banyak mengenai masalah penyuapan ini. Menurut pengakuannya, dia baru diangkat menjadi Chairman Monagro pada November tahun lalu," kata Erry kepada wartawan di KPK. Oleh karena itu, KPK kemudian meminta Monagro Kimia agar mengirimkan dokumen-dokumen perusahaan. Seperti akta pendirian perusahaan, laporan keuangan, kontrak-kontrak dengan konsultan dan penggantian pejabat pengurus. Dokumen itu akan dijadikan bukti adanya suap yang dilakukan Monsanto.

"Charuk berjanji akan mendatangkan dokumen tersebut pekan depan. Akta pendirian perusahaan, kontrak-kontrak dengan konsultan, laporan keuangan dan penggantian pengurus ada di luar negeri sehingga memerlukan waktu untuk mengambilnya," tegas Erry. Menurut Erry, dokumen-dokumen tersebut sangat penting. Dengan membaca dan menganalisis dokumen tersebut, diyakini KPK lebih mudah mengurai jalur-jalur suap yang rumit yang dilakukan Monsanto Co. "Dokumen itu sangat berguna untuk mengetahui alur-alur dan modus operandi tindakan suap Monsanto," jelas Erry. Selain Charuk, KPK juga memeriksa Kabalitbang Departemen Pertanian Ahmad Suryana. Rencananya Rabu depan, jelas Erry, KPK akan memeriksa Michael Villareal, konsultan Harvest International yang menjadi perantara Monsanto.

Sampai saat ini KPK telah memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih dan mantan Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH) Sonny Keraf. Diakui Keraf, saat itu, memang dia pernah didatangi oleh pihak Monsanto Company. Akan tetapi, ia membantah adanya penawaran sejumlah uang terhadap dirinya. "Tentu saja saya pernah didatangi, itu wajar saja. Mereka mencoba meyakinkan benih transgenik itu secara ilmiah. Mereka juga pernah mengajak saya ikut seminar mengenai hal itu," kata Keraf. Dalam pertemuan dengan Mosanto itu, Keraf menuturkan, pihak Monsanto juga memberi argumen kalau benih transgenik itu baik untuk disebarkan. Namun, karena budi daya seperti itu harus mendapat persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), ia mengeluarkan Kepmen 17/2001. Isinya penyebaran benih kapas itu harus mendapat persetujuan amdal.

Sementara itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mendesak agar Monsanto menyebutkan nama pejabat dari lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup yang menerima suap. "Bagi saya, yang penting dari penjelasan itu adalah untuk *clear*-nya departemen saya," katanya kepada wartawan, usai bertemu dengan Presiden, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Dia mengaku tidak yakin bila ada pejabat dari KLH yang menerima suap dari Monsanto. Mengingat, sambungnya, kementeriannya tidak pernah mengeluarkan keputusan yang dapat menguntungkan Monsanto.

"Kalau pejabat KLH disuap, maka itu terkait dengan kebijakan, karena KLH hanya mengeluarkan kebijakan. Sampai saat ini, KLH selalu konsisten untuk tidak menyetujui, atau memberi rekomendasi, terhadap pembukaan lahan kapas," katanya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP